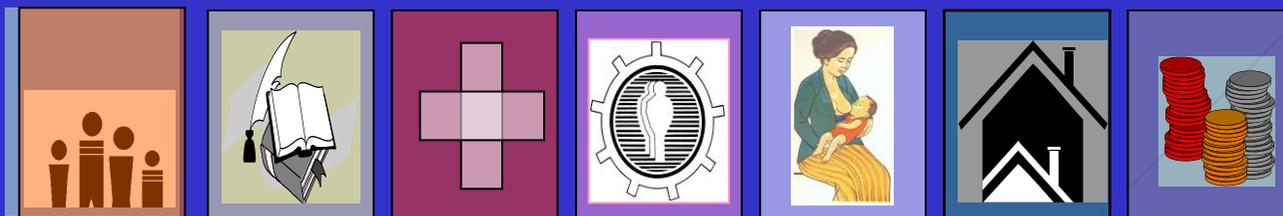


INKESRA



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KARO 2015



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KARO 2015

ISBN : 978-602-0988-97-9
Katalog : 4102004.1211
No. Publikasi : 12110.16.38
Ukuran Buku : 27,94 cm x 21,59 cm
Jumlah Halaman : vii + 51 hal

Naskah:

Bidang Statistik Sosial dan Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

Penyunting Naskah:

Bidang Statistik Sosial dan Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo
Jl. Jamin Ginting No.131 Desa Raya Berastagi

Dicetak Oleh :

CV. Rilis Grafika

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo telah dapat menyelesaikan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo 2015.

Dalam publikasi ini disajikan indikator-indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat yang mencakup aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, pola konsumsi, kemiskinan, pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan perumahan.

Diharapkan publikasi ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Karo sehingga dapat menjadi dasar dan acuan untuk menentukan arah kebijakan serta sebagai alat penilaian dan pemantauan terhadap pencapaian program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karo,

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pemikirannya sehingga publikasi ini dapat terwujud. Akhirnya semua kritik dan saran, sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Berastagi, Oktober 2016
BPS Kabupaten Karo
Kepala,

Doni Bukit, SE

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Sumber Data	2
1.4. Sistematika Penyajian	2
Bab 2. Metodologi	4
2.1. Kependudukan	4
2.2. Kesehatan	5
2.3. Pendidikan	6
2.4. Ketenagakerjaan	7
2.5. Taraf dan Pola Konsumsi	8
2.6. Perumahan	9
Bab 3. Kependudukan	11
3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	12
3.2. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	14
3.3. Kepadatan dan Distribusi Penduduk	16
Bab 4. Kesehatan	19
4.1. Angka Kesakitan	20
4.2. Penolong Kelahiran	21
4.5. Angka Harapan Hidup	23
Bab 5. Pendidikan	24
5.1. Angka Partisipasi Sekolah	26
5.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	29
5.3. Angka Buta Huruf	32
Bab 6. Ketenagakerjaan	34
6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	35
6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	35
6.3. Lapangan Pekerjaan	36
6.4. Status Pekerjaan	37

Bab 7.	Taraf dan Pola Konsumsi	39
	7.1. Pengeluaran Rumah Tangga	39
	7.2. Persentase Pengeluaran Menurut Golongan Pengeluaran perkapita	40
Bab 8.	Perumahan	42
	8.1. Kondisi Rumah	43
	8.2. Fasilitas Rumah	46
Bab 9.	Kemiskinan	50
	9.1. Perkembangan Penduduk Miskin	50

<http://karokab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Perkembangan Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo, 1990-2015	14
Tabel 3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin 2015	15
Tabel 3.3. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2015	17
Tabel 4.1. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan	21
Tabel 5.1. Persentase Penduduk Yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015	27
Tabel 5.2. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin 2015	28
Tabel 5.3. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Ijasah Tertinggi yang dimiliki dan Jenis Kelamin 2015	30
Tabel 5.4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Buta Huruf Menurut Kelompok Kepandaian Membaca dan Menulis, dan Jenis Kelamin 2015	32
Tabel 7.1. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Menurut Jenis Konsumsi Pengeluaran Perkapita/Bulan	40
Tabel 7.2. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita/bulan	41
Tabel 8.1. Kondisi Perumahan Kabupaten Karo, 2015	44
Tabel 8.2. Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Karo, 2015	46
Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, 2015	47
Tabel 8.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Buang Air Besar, 2015	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Grafik 3.1. Perkembangan Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo, 1990-2015	14
Grafik 4.1. Persentase Wanita 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, 2015	15
Grafik 5.1. Persentase Penduduk Menurut Ijazah yang Dimiliki, 2015	17
Grafik 6.1. Persentase Penduduk Kabupaten Karo Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/kota dan Lapangan Usaha, 2015	37
Grafik 8.1. Persentase Rumah tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Karo, 2015	43
Grafik 8.2. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Kabupaten Karo, 2015	45
Grafik 8.3. Persentase Rumah tangga menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Karo, 2015	48

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan bangsa merupakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit pembangunan bangsa telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, politik dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan merupakan komitmen seluruh bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan mengenai indikator kesejahteraan rakyat untuk melihat berbagai indikator keluaran pembangunan.

2. Tujuan

Penulisan Indikator kesejahteraan Rakyat 2015 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Karo. Indikator ini dapat dijadikan sebagai kompas yang tepat untuk memonitor pencapaian kesejahteraan rakyat.

Melalui analisis Indikator kesejahteraan Rakyat, perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan input mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada sebagai hasil dan target pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun diharapkan akan semakin efektif dan efisien, utamanya untuk melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi berdasarkan indikator-indikator yang ada. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan.

3. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan.

4. Sistematika Penyajian

Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam sembilan bagian, yaitu:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo 2015. Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk dan kepadatan/penyebaran penduduk disajikan pada bagian ketiga. Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya, kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi pendidikan di

Karo, dari sisi kualitas pendidikan penduduk pada bagian lima. Aspek ketenagakerjaan dibahas pada bagian enam. Aspek taraf dan pola konsumsi serta perumahan akan dibahas pada bagian tujuh dan delapan. Pembahasan ditutup dengan penyajian indikator kesejahteraan rakyat Karo 2015 pada aspek kemiskinan yaitu pada bagian sembilan.

<http://karokab.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

2.1. Kependudukan

- Tipe daerah, penentuan suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan berdasarkan indikator komposit (indikator gabungan) yang terdiri dari: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga tani, dan jumlah fasilitas perkotaan. Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-8, nilai satu adalah desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km², nilai dua adalah desa dengan kepadatan antara 500-1.249 orang per km², dan seterusnya sampai dengan nilai delapan yaitu desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8.500 orang per km². Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar antara 1-8. Nilai satu jika desa tersebut memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga pertanian, nilai dua jika 50-69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan 8, jika desa mempunyai 5 persen rumah tangga pertanian atau kurang. Skor untuk jenis fasilitas perkotaan adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan namun jaraknya masih relatif dekat atau mudah mencapainya maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1. Jumlah nilai dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Desa dengan nilai gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan sedangkan desa dengan skor maksimum 9 dikategorikan sebagai perdesaan.
- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.

- Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. kekuatan yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan yang mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi faktor kelahiran dan faktor kematian, sedangkan laju pertumbuhan sosial hanya dipengaruhi oleh migrasi.
- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.
- Akseptor aktif adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun.

2.2. Kesehatan

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.
- Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya

dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.

- Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.

2.3. Pendidikan

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal dan non formal (Paket A, B, dan C) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

2.4. Ketenagakerjaan

- Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula dalam pengangguran yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sudah diterima kerja namun belum belum mulai bekerja dan juga mereka yang sudah merasa putus asa dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.
- Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-

turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.

- Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok.
- Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- Jam kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).
- Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

2.5. Taraf dan Pola Konsumsi

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata perkapita dalam seminggu dikalikan dengan $30/7 \times 12$.

- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

2.6. Perumahan

- Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.
- Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
- Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).

- Air sumur/mata air terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur/mata air tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.

<http://karokab.bps.go.id>

BAB III

KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas

penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

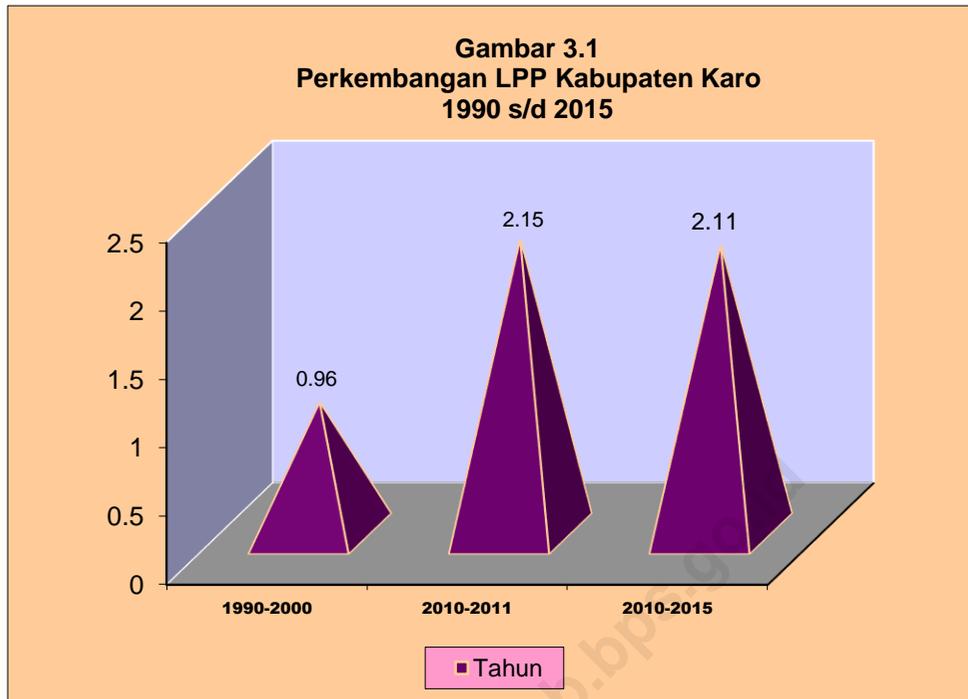
Untuk itu aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam angka meningkatkan kesejahteraan penduduk seperti: arus migrasi, angka kelahiran dan kematian. Ketiga komponen ini turut serta dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan politik serta pertahanan.

Data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dari data kependudukan dapat dibuat berbagai perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya. Data kependudukan yang terkait diantaranya data tentang jumlah penduduk, kepadatan, dan penyebaran penduduk serta data struktur umur penduduk.

3.1. Jumlah dan Pertumbuhan penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2015, jumlah penduduk Kabupaten Karo 389.591 jiwa. Pada periode 1990-2000 rata-rata laju pertumbuhan penduduk tercatat 0,96 persen, periode 2010–2011 adalah sebesar 2,15 persen, periode 2010-2015 adalah sebesar 2,11 persen.

Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, permasalahan kependudukan di Kabupaten Karo perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergis dengan program-program pembangunan lainnya yang dilaksanakan.



Pada tabel 3.1. ditampilkan jumlah penduduk Kabupaten Karo menurut kabupaten/kota serta laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2015. Kecamatan Berastagi, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Kabanjahe, dan Kecamatan Tigapanah, masing-masing sebesar 2,86 persen, 2,75 persen, 2,67 persen, dan 2,52 persen. Sebaliknya Kecamatan Barusjahe, Juhar, dan Munte adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling kecil yaitu berjumlah 1,25 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Dolat Rayat disebabkan karena pemekaran kecamatan yang mana Kecamatan Naman Teran adalah pemekaran kecamatan dari Kecamatan Simpang Empat sedangkan Kecamatan Dolat Rayat adalah pemekaran dari kecamatan Tigapanah.

Tabel 3.1.
Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Karo, 1990-2015

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun/ <i>Growth/Year (%)</i>		
	1990-2000	2010-2011	2010-2015
[1]	(2)	(3)	(4)
010 Mardinding	-0,68	2,38	2,11
020 Laubaleng	-0,69	2,19	2,22
030 Tigabinanga	-0,10	1,71	1,81
040 Juhar	0,26	0,00	1,25
050 Munte	1,14	0,64	1,25
060 Kutabuluh	-0,40	1,09	1,36
070 Payung	0,65	1,67	1,74
071 Tiganderket	-0,19	0,89	1,33
080 Simpang Empat	0,93	1,14	1,39
081 Naman Teran	1,68	3,36	1,79
082 Merdeka	1,73	3,62	2,75
090 Kabanjahe	1,32	3,07	2,67
100 Berastagi	1,62	3,36	2,86
110 Tigapanah	1,10	2,77	2,52
111 Dolat Rayat	1,48	2,26	2,12
120 Merek	3,07	2,20	2,18
130 Barusjahe	2,16	0,81	1,25
KARO	0,96	2,15	2,11

Sumber: Kabupaten Karo , Kabupaten Karo Dalam Angka 2016

3.2. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut.

Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Karo umumnya selalu lebih banyak dari penduduk laki-laki, yang diperlihatkan melalui rasio jenis kelaminnya. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2015 diketahui jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Karo 193.397 jiwa dan perempuan 196.194 jiwa atau sex ratio sebesar 98,57 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98,57 penduduk laki-laki.

Tabel 3.2
Jumlah dan Persentase Penduduk
Menurut Kecamatan, dan Jenis Kelamin 2015

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Mardinding	9 454	9 486	18 940	99,66
020 Laubaleng	9 839	9 927	19 766	99,11
030 Tigabinanga	10 854	10 909	21 763	99,50
040 Juhar	7 038	7 052	14 090	99,80
050 Munte	10 439	10 510	20 949	99,32
060 Kutabuluh	5 601	5 726	11 327	97,82
070 Payung	5 840	5 972	11 812	97,79
071 Tiganderket	6 901	7 177	14 078	96,15
080 Simpang Empat	10 183	10 190	20 373	99,93
081 Naman Teran	6 896	7 089	13 985	97,28
082 Merdeka	7 577	7 667	15 244	98,83
090 Kabanjahe	35 346	36 900	72 246	95,79
100 Berastagi	24 410	24 565	48 975	99,37
110 Tigapanah	16 483	16 724	33 207	98,56
111 Dolat Rayat	4 556	4 656	9 212	97,85
120 Merek	10 348	9 761	20 109	106,01
130 Barusjahe	11 632	11 883	23 515	97,89
JUMLAH	193 397	196 194	389 591	98,57

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka Tahun 2016

Dilihat masing-masing kecamatan di Kabupaten Karo, pada tahun 2015 rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kecamatan Merek sebesar 106,01 disusul Kecamatan Simpang Empat dan Juhar yaitu masing-masing sebesar 99,93 dan 99,80.

Hal ini dapat diduga karena daerah ini umumnya adalah daerah pertanian yang lebih menuntut peran laki-laki. Sebaliknya Kecamatan Kabanjahe adalah kecamatan dengan sex ratio paling kecil yaitu 95,79 disusul kecamatan lainnya adalah Tiganderket. Kondisi ini menunjukkan bahwa umumnya penduduk laki-laki di wilayah tersebut cenderung pergi keluar untuk bekerja atau bersekolah.

3.3. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah masih timpangnya penyebaran penduduk antar daerah, sehingga kepadatan untuk masing-masing kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah pedesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Tabel 3.3
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan, Tahun 2015

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)	DISTRIBUSI (PERSEN)
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Mardinding	18.940	70,91	4,86
020 Laubaleng	19.766	78,25	5,07
030 Tigabinanga	21.763	135,70	5,59
040 Juhar	14.090	64,47	3,62
050 Munte	20.949	166,74	5,38
060 Kutabuluh	11.327	57,88	2,91
070 Payung	11.812	250,04	3,03
071 Tiganderket	14.078	162,26	3,61
080 Simpang Empat	20.373	217,94	5,23
081 Naman Teran	13.985	159,25	3,59
082 Merdeka	15.244	345,12	3,91
090 Kabanjahe	72.246	1618,05	18,54
100 Berastagi	48.975	1605,74	12,57
110 Tigapanah	33.207	177,73	8,52
111 Dolat Rayat	9.212	285,64	2,36
120 Merek	20.109	160,22	5,16
130 Barusjahe	23.515	183,65	6,04
JUMLAH	389.591	183,14	100,00

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka Tahun 2015

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah kelurahan. Kecamatan Kabanjahe sebagai ibu kota Kabupaten Karo yang luasnya sebesar 44,65 km² adalah kota terpadat yang setiap kilometer persegi^{nya} ditempati 1618,65 jiwa/ km². Disusul Kecamatan Berastagi, dengan luas hanya 30,50 km² dari luas daratan Kabupaten Karo memiliki kepadatan penduduk mencapai 1.605,74 jiwa/km². Pada umumnya daerah kelurahan mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi. Kondisi ini disebabkan daerah perkotaan

memiliki fasilitas yang lebih lengkap, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang untuk melakukan migrasi. Sebaliknya, tingkat kepadatan penduduk yang rendah tersebar di wilayah Kecamatan di Kabupaten Karo. Kecamatan Kutabuluh hanya dihuni oleh 57,88 jiwa per kilometer persegi, disusul Kecamatan Juhar dan Mardinding yaitu 64,47 jiwa per kilometer persegi dan 70,91 jiwa per kilometer persegi.

<http://karokab.bps.go.id>

BAB IV

KESEHATAN

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya.

Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama pembangunan manusia. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata karena memang salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusatpusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti Puskesmas, Posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

4.1. Angka kesakitan (*Morbidity Rate*)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu atau mengalami sakit. Tingkat kesakitan ini selain secara umum, dapat juga keluhan menurut jenis penyakit.

Sejak tahun 2011, tingkat morbiditas di Kabupaten Karo menunjukkan pola yang menurun yang berarti tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Karo dapat dikatakan meningkat. Pada tahun 2011 sebanyak 29,19 persen penduduk Kabupaten Karo mengalami sakit, kemudian turun menjadi 24,25 dan 13,77 persen masing-masing pada tahun 2013 dan 2015. Jika dilihat menurut jenis kelamin, umumnya perempuan lebih banyak menderita sakit.

Berbagai upaya dilakukan penduduk untuk menjaga kesehatan, baik secara mandiri maupun oleh keluarganya yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap. Berobat sendiri merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya, dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Adapun rawat inap adalah proses penyembuhan penyakit yang

dilakukan di fasilitas kesehatan yang mendukung, dibawah pendampingan dan pengawasan petugas kesehatan yang kompeten. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya cara berobat dengan mengobati sendiri sebenarnya tidak direkomendasikan.

Pada Tabel 4.1. diketahui bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kemudian berobat jalan untuk mengobati sakitnya adalah sebesar 74,85 persen. Kemudian jika ditelusuri kembali terkait alasan kenapa tidak berobat jalan, merasa tidak perlu untuk berobat jalan merupakan penyebab utama yakni mencapai 48,26 persen. Penyebab lainnya yang cukup besar adalah berobat sendiri berdasarkan pengetahuannya untuk mengobati penyakit dan permasalahan biaya. Terkait dengan permasalahan biaya sebenarnya saat ini pemerintah telah menyusun Undang-undang terkait jaminan sosial.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk di Kabupaten Karo yang Berobat Jalan dan Alasan Utama tidak Berobat Jalan, 2015

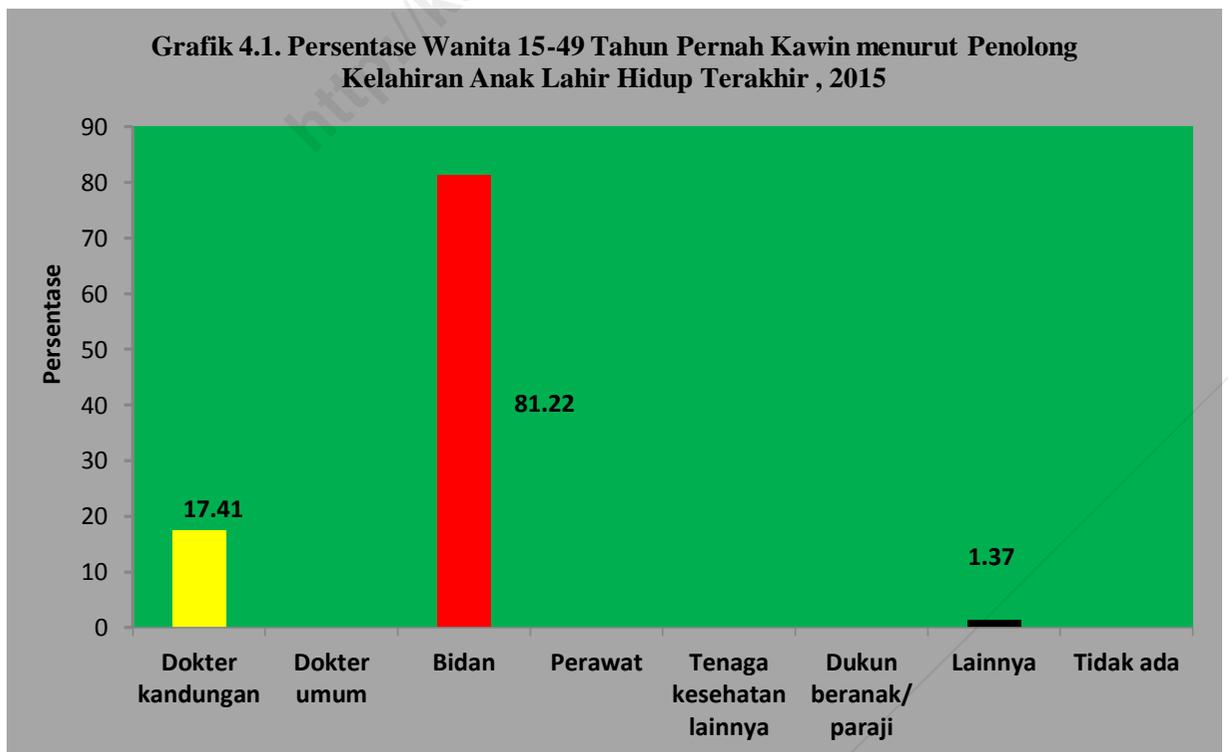
Jenis Kelamin	Berobat Jalan	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan							
		Tidak punya biaya berobat	Tidak ada biaya transport	Tidak ada sarana transportasi	Waktu tunggu pelayanan lama	Mengobati sendiri	Tidak ada yang mendampingi	Merasa tidak perlu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Laki-Laki	71.89	7.35	0.00	0.00	0.00	49.97	0.00	40.80	1.88
Perempuan	77.52	6.47	0.00	0.00	0.00	35.48	0.00	56.66	1.40
LK + PR	74.85	6.93	0.00	0.00	0.00	43.15	0.00	48.26	1.65

4.2. Penolong Kelahiran

Salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika

dibanding ditolong oleh bukan tenaga medis seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu.

Pada tahun 2015 penolong kelahiran balita di Kabupaten Karo pada umumnya adalah bidan/tenaga medis lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dimana penolong kelahiran anak lahir hidup terakhirnya ditolong oleh bidan/tenaga medis lainnya adalah sebesar 81,22 persen. Tingginya persentase kelahiran yang ditolong oleh bidan, sangat mungkin disebabkan ketersediaan dan tingkat kepercayaan terhadap bidan relatif tinggi. Tenaga penolong kelahiran lainnya yang cukup tinggi adalah dokter. Yang masih harus menjadi perhatian adalah masih adanya penolong kelahiran oleh selain tenaga medis sebesar 1,37 persen.



Masih cukup besarnya peran bidan dalam membantu kelahiran balita perlu sudah cukup bagus dan harus tetap mendapat perhatian. Usaha yang mungkin dapat dilakukan adalah menambah kekurangan tenaga medis bidan secara merata di daerah-daerah Kabupaten Karo serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan bidan agar mengerti tata cara menolong kelahiran yang aman dan sehat.

4.3. Angka Harapan Hidup

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo pada tahun 2014 adalah 70,42, dan meningkat pada tahun 2015 yaitu 70,62.

Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

BAB V

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari Pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang memadai dan juga ditunjang dengan

kemampuan masyarakat, karena sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, yaitu banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Ditengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. kebijaksanaan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program di luar pendidikan formal, diantaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh.

Program atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

5.1. Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang masih terlibat dalam sistem pendidikan. Adakalanya penduduk usia 7 – 12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat SD.

Tabel 5.1
 Persentase Penduduk Yang masih sekolah Menurut Kelompok Umur
 dan Jenis Kelamin tahun 2015

AKTIVITAS PENDIDIKAN MENURUT KELOMPOK UMUR	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDUDUK 7-12 TAHUN	99,11	98,15	98,65
PENDUDUK 13-15 TAHUN	89,62	97,45	93,33
PENDUDUK 16-18 TAHUN	69,75	88,75	79,73
PENDUDUK 19-24 TAHUN	11,84	28,78	19,56
PENDUDUK 7-15 TAHUN	96,29	97,95	97,08
PENDUDUK 7-24 TAHUN	70,03	79,44	74,54

Sumber: BPS Kabupaten Karo , Susenas 2015

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Karo pada usia 7-12 tahun 2015 sebesar 99,11 persen untuk jenis kelamin laki-laki dan 98,15 persen untuk jenis kelamin perempuan. Kemudian pada kelompok umur 13-15 sebesar 89,62 persen untuk jenis kelamin laki-laki dan 97,45 persen untuk jenis kelamin perempuan. Demikian juga pada kelompok umur 16-18 sebesar 69,75 persen untuk jenis kelamin laki-

laki dan 88,75 persen untuk jenis kelamin perempuan dan kelompok umur 19-24 sebesar 11,84 persen untuk jenis kelamin laki-laki dan 28,78 persen untuk jenis kelamin perempuan.

Tabel 5.2
 Persentase Penduduk Usia 10 tahun Ke atas
 Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin 2015

STATUS PENDIDIKAN	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH	0,70	1,93	1,33
MASIH SEKOLAH			
- SD	9,13	8,35	8,73
- SMTP	6,48	6,47	6,48
- SMTA	3,58	4,76	4,18
- Diploma/Sarjana	1,07	2,73	1,91
TIDAK BERSEKOLAH LAGI	79,04	75,75	77,37
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Karo, Susenas 2015

Berdasarkan hasil susenas 2015, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status sekolah, terlihat bahwa lebih dari setengah penduduk Kabupaten Karo tidak bersekolah lagi, yaitu 77,37 persen (79,04 persen untuk penduduk laki-laki dan 75,75 persen untuk penduduk perempuan). Adapun penduduk yang masih sekolah sekitar 21,30 persen (20,26 Persen penduduk laki-laki dan 22,31 persen untuk perempuan), sedangkan penduduk yang tidak sekolah/belum pernah sekolah masih ada sekitar 1,33 persen (0,70 persen untuk laki-laki dan 1,93 persen untuk penduduk perempuan). Dari gambar tersebut terlihat bahwa keterlibatan

penduduk laki-laki dalam dunia pendidikan masih dominan dibandingkan penduduk perempuan.

5.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu penghambat dalam percepatan pembangunan, karena pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hakekat pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Pendidikan yang rendah dapat dirasakan sebagai penghambat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pendidikan mutlak diperlukan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan penduduk melalui proses pembangunan. Hal seperti ini sejalan dengan hakekat dari tujuan pendidikan itu sendiri, yakni merupakan usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Keadaan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang dimiliki di Kabupaten Karo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang pada umumnya di tingkat SD sampai dengan

tingkat Perguruan Tinggi. Hasil Susenas 2015 menunjukkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang dimiliki mulai tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi sebesar 81,52 persen, selebihnya sekitar 17,39 persen adalah mereka yang berpendidikan SD kebawah (Tabel 4.3).

Tabel 5.3.
 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas
 Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin
 2015

IJASAH TERTINGGI YANG DIMILIKI	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
TIDAK PUNYA IJASAH	18,12	17,79	17,96
SD/MI/ SEDERAJAT	22,24	18,77	20,48
SLTP/MTS/SEDERAJAT/KEJURUAN	20,92	23,27	22,11
- SMU/MA/SEDERAJAT	27,22	29,81	28,53
- SM KEJURUAN	5,58	2,73	4,13
- Diploma I/II	0,79	0,91	0,85
- Diploma III	0,92	3,06	2,01
- Diploma IV/Sarjana	4,21	3,66	3,93
- S2/S3	-	-	-
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Karo, Susenas 2015

Penduduk usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijasah SD/MI sebanyak 20,48 persen. Sekitar 22,11 persen penduduk usia 10 tahun keatas yang mempunyai ijasah SLTP/MTs/ sederajat, dan sekitar 28,53 yang memiliki ijasah SMU/MA/SM Kejuruan sederajat. Dari satu sisi, dari setiap 100 orang

berusia 10 tahun ke atas hanya sekitar 6,79 persen orang diantaranya telah meluluskan pendidikannya dan memiliki ijazah dari D-I atau lebih.

K keadaan ini dapat dianggap masih rendah dan oleh karena itu upaya untuk meningkatkan derajat pendidikan di Kabupaten Karo masih perlu terus menerus ditingkatkan. Jika dibandingkan antara penduduk menurut jenis kelamin, maka terlihat bahwa kondisi pendidikan penduduk laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan, khususnya tamatan SLTA ke atas. Penduduk laki-laki yang memiliki ijazah SD/MI sekitar 22,24 persen, sedangkan penduduk perempuan sekitar 18,77 persen (Gambar 4.1).

Penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijazah SLTP/MTs sekitar 20,92 persen sedangkan penduduk perempuan sekitar 23,27 persen penduduk usia 10 tahun ke atas. Penduduk laki-laki yang telah tamat dari SLTA/MA/SM sekitar 27,22 persen, sedangkan untuk penduduk perempuan lebih tinggi yaitu 29,81 persen. Untuk pendidikan tinggi sekitar 5,98 persen laki-laki usia 10 tahun ke atas yang telah menyangang ijazah/diploma D-I sampai dengan Sarjana (S-1 atau lebih), sedangkan penduduk perempuan hanya sekitar 7,63 persen.



4.3. Angka Buta Huruf

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Kemampuan membaca dan menulis akan mendorong meningkatnya peran aktif penduduk dalam proses pembangunan. Secara persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis di Kabupaten Karo dapat dikatakan rendah. Menurut hasil susenas 2015, persentase penduduk yang melek huruf sebanyak 99,26 persen dan buta huruf 0,74 Persen.

Tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf dapat di jadikan salah satu indikator tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Selanjutnya tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

Tabel 5.4
 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Buta Huruf
 Menurut Kelompok Kepandaian Membaca dan Menulis, dan Jenis Kelamin

KEPANDAIAN MEMBACA DAN MENULIS	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Huruf Latin	99,40	97,85	98,61
Huruf Arab	5,14	5,82	5,49
Huruf lainnya	3,91	1,11	1,00
Buta huruf	0,88	1,31	0,74
JUMLAH	100	100	100

Sumber: BPS Kab. Karo, Susenas 2015

Jika diperhatikan dari kepandaian membaca dan menulis penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis huruf latin 99,40 persen dan perempuan

97,85 persen. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis huruf arab laki-laki sebesar 5,14 persen sedang perempuan 5,82 persen. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis huruf lainnya laki-laki sebesar 0,88 persen dan perempuan sebesar 1,11. Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang buta huruf laki-laki sebesar 0,15 persen dan perempuan sebesar 1,31 persen.

<http://karokab.bps.go.id>

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Secara teori, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*economically active*) didefinisikan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Penduduk yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (*uneconomically active*) adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Karo diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Karo dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), dan tingkat pengangguran. Selain itu, disajikan pula

secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk usia kerja (*15 tahun ke atas*) digolongkan sebagai:

- (i) angkatan kerja, bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan, dan
- (ii) bukan angkatan kerja, bila mereka bersekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya.

Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berarti semakin besar keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam pasar kerja.

Pada tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Karo adalah 267.700 orang yang terdiri dari 228.207 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 39.493 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja disuatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa TPAK di Kabupaten Karo tahun 2015 sebesar 85,25 persen, artinya bahwa pada tahun 2015 sebanyak 85,25 persen penduduk usia kerja di Kabupaten Karo siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang

mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 di Kabupaten Karo sebesar 2,23 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun ke tahun cenderung menurun. Kecenderungan menurunnya tingkat pengangguran terbuka ini tentunya sinyal positif bagi kesejahteraan di Kabupaten Karo. Disadari bahwa, semakin tinggi pengangguran akan berakibat pada meningkatnya kerawanan sosial.

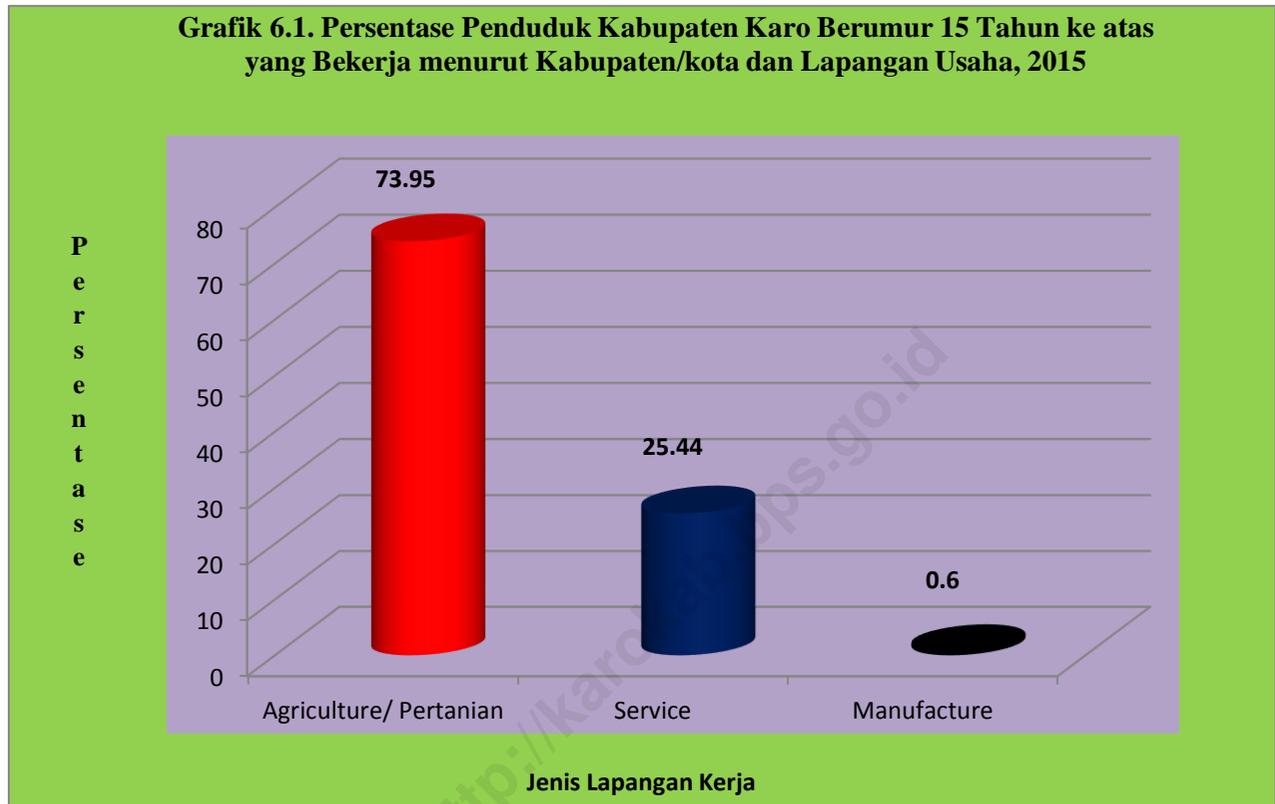
Hal yang cukup menarik jika mencermati TPT di Kabupaten Karo umumnya di bawah 10 persen. Hal ini dapat dipahami bahwa di Kabupaten Karo pada umumnya merupakan daerah pertanian, dan tidak sulit untuk bekerja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Berbeda di perkotaan dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, penduduk usia kerja umumnya lebih selektif untuk mencari pekerjaan, selain karena sudah terbatasnya lahan pertanian.

6.3. Lapangan Pekerjaan

Dalam memudahkan analisis pada sektor perekonomian, maka lapangan pekerjaan utama yang terdiri dari sembilan sektor dibagi dalam tiga kelompok utama, yaitu sektor A (Pertanian), sektor M (Pertambangan/penggalian, Industri, Listrik, Gas & Air dan Bangunan), serta sektor S (Angkutan, Perdagangan, Keuangan dan Jasa) atau ketiga kelompok tersebut dapat dikelompokkan sebagai sektor Primer, Sekunder dan Tertier.

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karo. Perkembangan 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2015 sebanyak 73,95 persen penduduk Kabupaten Karo bekerja di sektor *Agriculture*/pertanian, kemudian disusul sektor *Service* (Angkutan, Perdagangan, Keuangan dan Jasa) sebesar 25,44 persen dan sisanya 0,6 persen pada

sektor *Manufacture* (Pertambangan/penggalian, Industri, Listrik Gas dan Air serta Bangunan) seperti yang terlihat pada gambar 6.1.



6.4. Status Pekerjaan

Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja keluarga. Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tersebut.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relative '*tradisional*'. Sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern, lebih banyak buruh atau

karyawan dan pengusaha dengan buruh tetap. Pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama dikalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.

<http://karokab.bps.go.id>

BAB VII

TARAF DAN POLA KONSUMSI

7.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Kabupaten Karo terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.017.660,-, terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 582.377,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp. 435.323,-. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan, berarti sebagian besar dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan), yaitu sebesar 57,22 persen. Pengeluaran perkapita Kabupaten Karo merupakan pengeluaran tertinggi kedua di Sumatera Utara setelah Kota Medan yaitu sebesar Rp. 1.066.118.

Tabel 7.1
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan
Menurut Jenis Konsumsi Pengeluaran Per Kapita/bulan

Jenis Konsumsi	Kabupaten Karo		Sumatera Utara	
	Pengeluaran/ Kapita/Bulan	Persentase Pengeluaran/Kapi ta/Bulan	Pengeluaran/K apita/Bulan	Persentase/Peng eluaran/ Kapita/Bulan
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
Makanan	582.337	57,22	414.566	53,48
Bukan Makanan	435.323	42,78	360.624	46,52
JUMLAH	1.017.660	100	775.189	100

Sumber : BPS Kabupaten Karo. Susenas 2015

Secara umum persentase pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Karo lebih tinggi dibanding dengan Sumatera Utara yaitu masing-masing sebesar 53,48 persen dan 46,52 persen.

7.2. Persentase Pengeluaran Menurut Golongan Pengeluaran per kapita/Bulan

Selain penambahan pendapatan/pengeluaran, persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan juga dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat suatu daerah, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran untuk bukan makanan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 7.2
 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita/bulan
 Tahun 2015

GOLONGAN PENGELUARAN	PERSENTASE PENDUDUK
(1)	(2)
< 200.000	0,00
200.000-299.999	0,17
300.000-499.999	5,02
500.000-749.999	21,94
750.000-999.999	18,10
1.000.000-1.249.999	15,16
1.250.000-1.499.999	5,31
1.500.000 +	34,31
JUMLAH	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Karo. Susenas 2015

BAB VIII

PERUMAHAN

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 yang mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi tugas bagi negara yang penyelenggaraan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

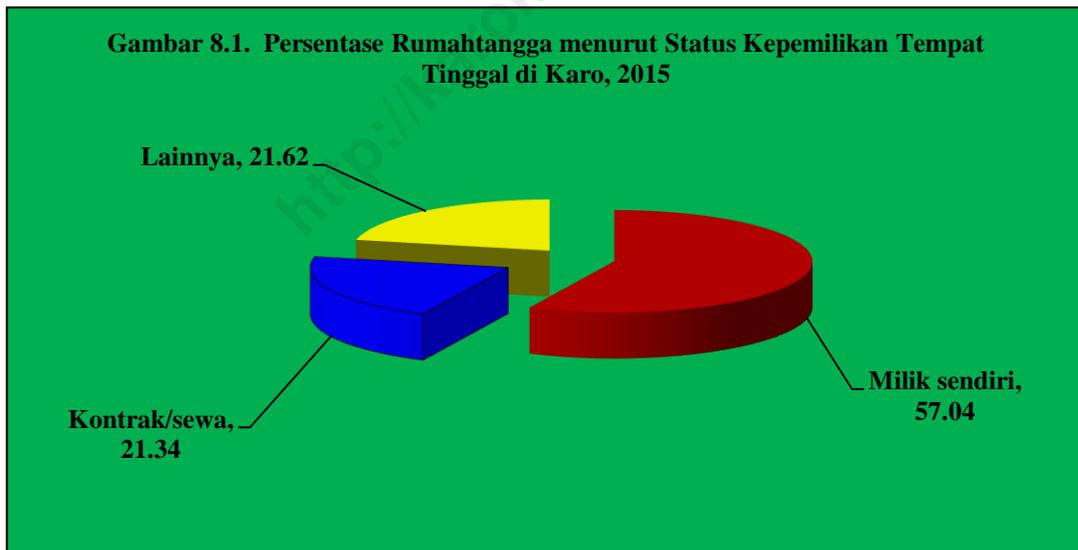
Manusia dan lingkungannya baik fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah dan juga buatan. Untuk melindungi diri dari kondisi alam, manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang dikenal dengan rumah atau tempat tinggal. Oleh sebab itu selain sandang dan pangan, papan (perumahan) juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Sampai saat ini permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya sehingga menyebabkan banyak rumah tangga menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu ditentukan oleh fasilitas rumah yang ada. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya terlihat dari luas lantai, sumber air minum,

fasilitas tempat buang air besar dan lainnya. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

8.1. Kondisi Rumah

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumah tangga terhadap rumah yang ditematinya.



Sekitar dua per tiga rumahtangga yang ada di Kabupaten Karo (57,04 %) mendiami rumah milik sendiri, dan sebanyak 21,34 % rumah tangga masih menyewa/mengontrak, sedangkan sisanya (21,62 %) mendiami rumah dinas/bebas sewa/rumah orang tua/family dan lainnya. Persentase rumah tangga yang menyewa/mengontrak masih cukup besar

sehingga perlu mendapat perhatian. Mereka yang masih menyewa/mengontrak adalah rumah tangga baru atau mereka yang belum mampu memiliki rumah sendiri karena keterbatasan pendapatannya.

Tingkat kelayakan kondisi tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kondisi rumah tinggalnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan rumah antara lain jenis lantai (bukan tanah), jenis dinding (tembok) dan jenis atap (asbes/seng/genteng). Ketiga indikator ini dianggap mempengaruhi keadaan kesehatan anggota rumahtangga yang juga berdampak pada tingkat kesejahteraannya. Secara umum, semakin besar persentase nilai indikator tersebut berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

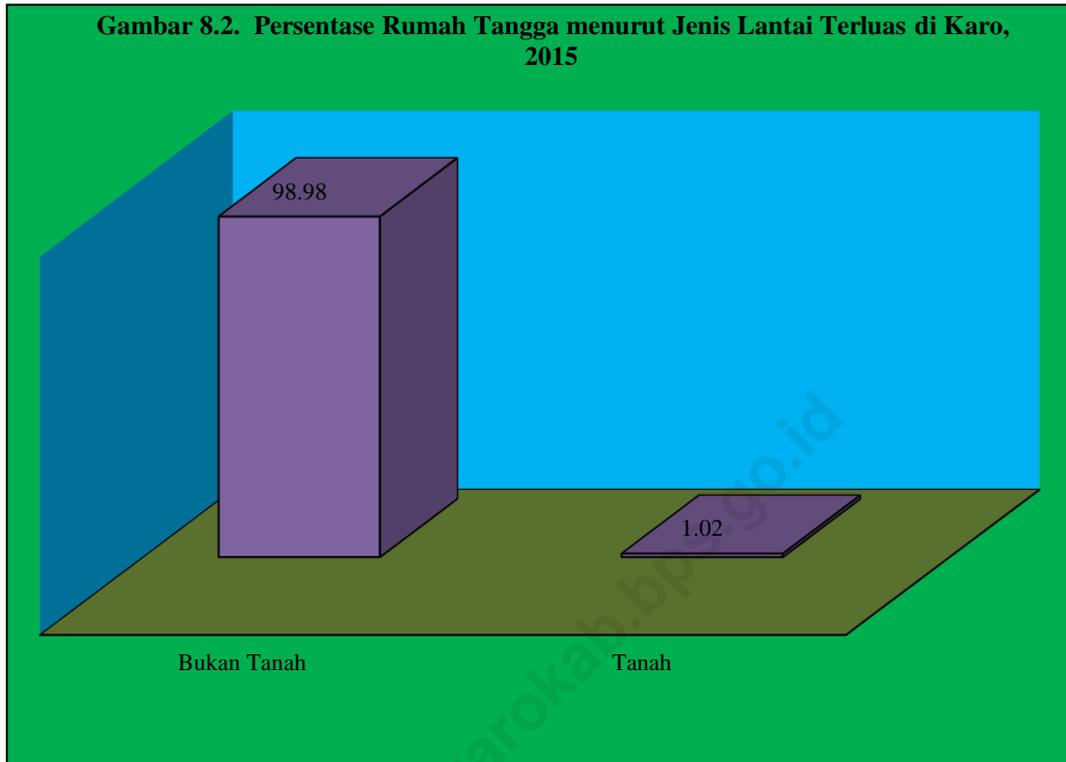
Tabel. 8.1. Kondisi Perumahan Kabupaten Karo, 2015

URAIAN	2015
(1)	(2)
1. Rata-rata luas lantai perkapita (M ²)	22,50
2. Rumah tangga dengan lantai bukan tanah (%)	98,98
3. Rumah tangga dengan dinding rumah Tembok (%)	42,98
4. Rumah tangga dengan atap beton, genteng, sirap dan seng (%)	98,29

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2015

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi perumahan di Kabupaten Karo menunjukkan perbaikan. Hal ini diperlihatkan dengan semakin meningkatnya indikator kualitas perumahan. Indikator pertama yang dapat dilihat adalah luas lantai perkapita. Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumahtangga, karena harga tanah yang semakin mahal saat ini. Semakin luas lantai suatu rumahtangga, maka semakin

tinggi pul tingkat ekonomi rumah tangga. Pada tahun 2015 rata-rata rumah tangga di Kabupaten Karo memiliki luas lantai per kapita sekitar 22,50 M².



Selain luas lantai, jenis lantai terluas merupakan indikator kesejahteraan. Jenis lantai terbuat dari tanah tentunya tidak memenuhi syarat kesehatan, karena dapat menjadi bersarangnya kuman-kuman penyakit. Pada gambar 9.2. diketahui bahwa sekitar 1,02 persen rumah tangga di Kabupaten Karo masih tinggal di rumah dengan lantai tanah. Kondisi yang memprihatinkan ini masih menjadi pemandangan di daerah perdesaan, sebab masih 1,02 persen rumahtangga tinggal di rumah yang lantainya kurang sehat.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan hunian sebuah rumah adalah jenis dinding dan atap. Pada tahun 2015, sekitar 42,98 persen rumahtangga tinggal di rumah dengan dinding tembok. Selain tembok bahan lain yang cukup dominan adalah kayu yakni sekitar 51,89 persen. Hampir seluruhnya atau sekitar 98,29 persen

rumahtangga tinggal di rumah dengan atap seng, beton dan genteng.

8.2. Fasilitas Rumah

Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisinya tapi juga dari ketersediaan fasilitas penunjang perumahan yang utama diantaranya adalah sumber penerangan utama yang digunakan, kepemilikan fasilitas air minum, dan kepemilikan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik. Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumahtangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rumahtangga pengguna listrik semakin meningkat. Pada tahun 2015 sebanyak 99,47 persen rumahtangga di Kabupaten Karo menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN.

Tabel 8.2.
Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Karo, 2015

LUAS LANTAI	2015
(1)	(2)
1. Persentase rumahtangga dengan sumber penerangan listrik (%)	99,47
2. Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri (%)	49,44
3. Rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri (%)	77,50

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2015

Selanjutnya dari aspek sumber air minum, dapat dikatakan kondisinya masih jauh dari ideal. Hal ini ditunjukkan, hanya sekitar 49,44 persen rumahtangga di Kabupaten Karo yang memiliki fasilitas air minum sendiri, sedangkan sisanya menggunakan

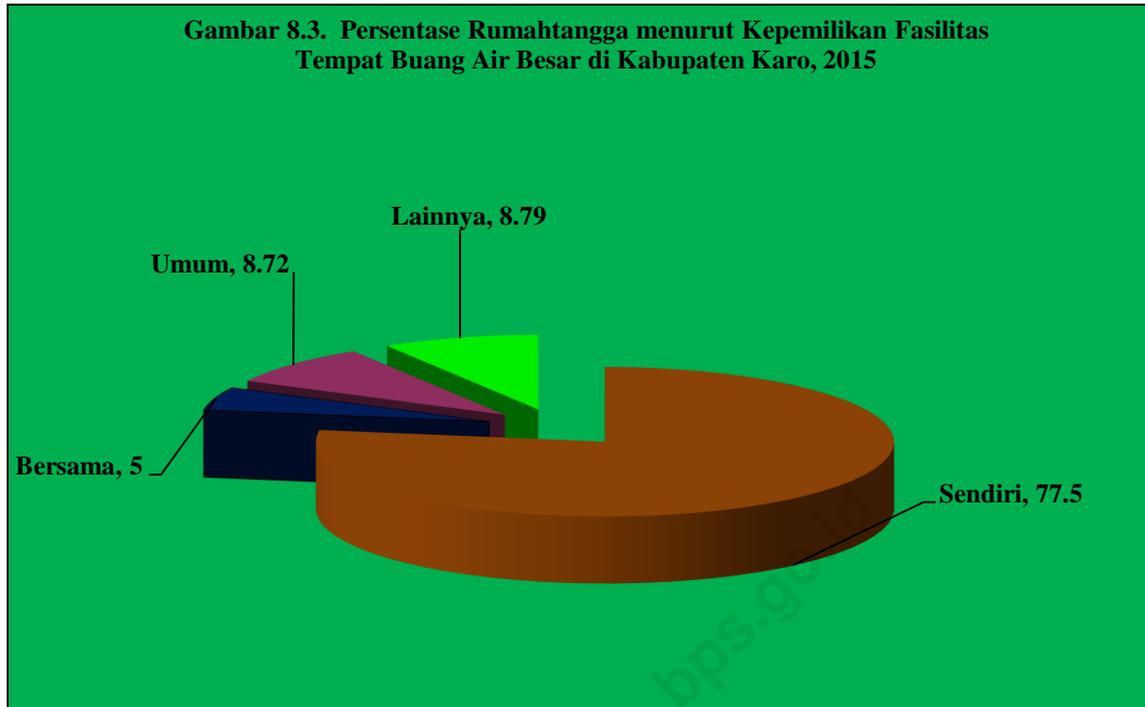
fasilitas air minum secara bersama-sama bahkan tidak memiliki. Selain fasilitas kelayakan rumah dari aspek air minum dapat dilihat dari sumbernya karena kualitas air yang digunakan terkait erat dengan tingkat kesehatan. Dibanding dengan sumber air lainnya, air kemasan merupakan sumber air yang paling baik kualitasnya kemudian disusul dengan air ledeng. Air yang berasal dari pompa, sumur, sungai, hujan dan sebagainya, dianggap kurang baik karena kemungkinan tercemar relatif cukup besar.

Tabel 8.3
 Persentase Rumah tangga
 Menurut Sumber Air Minum, di Kabupaten Karo 2015

SUMBER AIR MINUM	PERSENTASE
(1)	(2)
1 Air Dalam Kemasan	4,79
2 Air isi ulang	3,84
2 Ledeng	31,24
3 Pompa	18,26
4 Sumur Terlindung	2,29
5 Sumur Tidak Terlindung	0,68
6 Mata Air Terlindung	37,02
7 Mata Air Tidak Terlindung	0,95
8 Air Sungai	0,58
9 Air Hujan	0,37
10 Lainnya	0,00
JUMLAH	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2015

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Karo menggunakan sumber air minum dari mata air terlindung yaitu mencapai 37,02 persen, ledeng 31,24 persen. Sebaliknya, sumur bor mencapai 18,26 persen.



Selain sumber air minum dan listrik, fasilitas rumah lainnya yang sangat penting adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur). Oleh karena itu tempat penampungan akhir sangat penting bagi kesehatan lingkungan. Tangki septik merupakan pilihan terbanyak rumah tangga yaitu sebesar 78,80 persen. Selain itu masih terdapat sekitar 11,41 persen tempat penampungan di tempat lain dan 9,45 persen di sungai/danau/laut.

Tabel 8.4.
 Persentase Rumah tangga menurut Tempat Penampungan
 Akhir Buang Air Besar, 2015

Tempat penampungan akhir [1]	Persentase [2]
1. Tangki Septik	78,80
2. Kolam/sawah /Sungai/Danau	9,45
3. Lubang tanah/kebun	7,40
4. Lainnya	4,35

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2015

Jika dilihat dari status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Karo sudah mempunyai fasilitas sendiri (77,50 persen).

BAB IX

KEMISKINAN

9.1. Perkembangan Penduduk Miskin

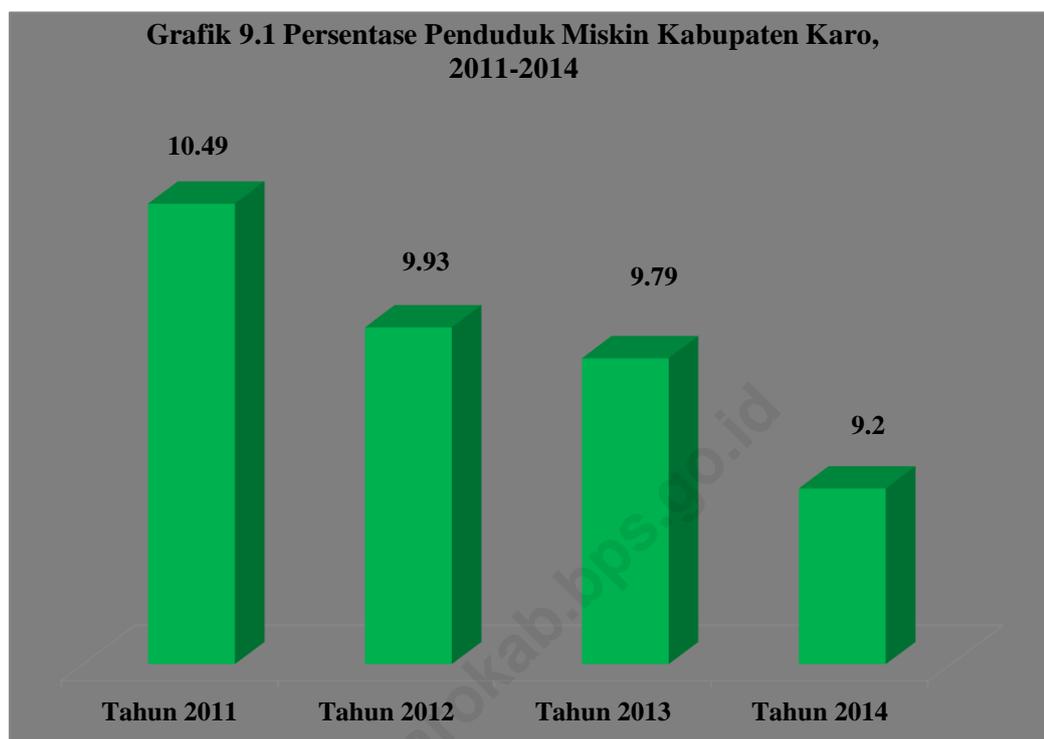
Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, di mana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangyang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energy kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energy sebesar 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin di

Kabupaten Karo sekitar 10,49 persen kemudian turun menjadi 9,93 persen, pada tahun 2012. Angka ini kembali turun menjadi 9,79 persen pada tahun 2013 dan 9,20 persen pada tahun 2014.



Persentase penduduk miskin Kabupaten Karo yang terlihat pada gambar diatas adalah diperoleh dengan menggunakan salah satu indikator yaitu angka garis kemiskinan dimana pada tahun 2011 angka garis kemiskinan Kabupaten Karo sebesar 315.547 rupiah, tahun 2012 sebesar 327.311 rupiah, tahun 2013 337.578 rupeiah dan pada tahun 2014 sebesar 343.225 rupiah. Dengan indikator tersebut pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin Kabupaten Karo adalah 35.360 jiwa..

DATA

MENCERDASKAN BANGSA
— Enlighten The Nation —



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO

Jl. Jamin Ginting No. 131, Raya, Berastagi

Telp. : (0628) 92675, Fax. : (0628) 92651

Homepage : <http://karokab.bps.go.id> E-mail : bps1211@bps.go.id

